

## B. Saran-saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, maka dapatlah penulis berikan saran untuk mengoptimalkan dalam menyelesaikan dan mengatasi problematika eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, antara lain sebagai berikut;

1. Bank sebagai Kreditur hendaknya dalam menerima jaminan kredit yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan mencermati masa berlaku hak Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimaksud, dan apabila berakhirnya jangka waktu hak Sertifikat Hak Guna Bangunan lebih pendek dari pada jangka waktu perjanjian kreditnya, makahendaknya kreditur mensyaratkan debitur untuk terlebih dahulu melakukan perpanjangan jangka waktu hak Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimaksud.
2. Perlu adanya penambahan klausula dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menegaskan bahwa; debitur sanggup untuk melakukan perpanjangan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimaksud apabila jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lebih pendek dari pada jangka waktu perjanjian kreditnya.
3. Agunan atau jaminan yang diterima kreditur yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang jangka waktunya lebih pendek dari jangka waktu perjanjian kreditnya maka dengan persetujuan dan kuasa dari debitur/pemilik jaminan, kreditur dapat melakukan perpanjangan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimaksud untuk menghindari hal-hal yang merugikan pihak kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Pertama, PT Kencana, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, (2011) *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Jontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, (1993), *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Gunarto Suhardi, (2003), *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djuhaendah Hasan, (1996), *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanuddin Rahman, (1995) *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, (2011) *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- J. Satrio, (1991) *Hukum Jaminan, Hak –Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, (1997) *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti (Buku 1), Bandung.
- \_\_\_\_\_, (1998) *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti (Buku 2), Bandung.
- Kasmir, (Edisi Revisi 2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, (2007) *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, (1996) *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, (2009) *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, (1991) *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, (2000) *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, (1984) *Dasar-dasar Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, (1988) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1976) *Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1980) *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1982) *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Sidharta P. Soerjadi, (1978) *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia, Kertas Kerja dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN Binacipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, (2015), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Keempat, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Subekti, (1987) *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

Supriadi, (2009), *Hukum Agraria*, Sinar Grafika.

Subekti, (1991) *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remi Sjahdeini, (1999) *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok, dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

Theo Huijbers, (2015), *Filsafat Hukum*, Ketujubelas, PT. Kanisius, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, (1990), *Filsafat Hukum*, Pertama, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Zainal Asikin, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Sumber-Sumber Lain**

Gunarto Suhardi, SH, *Tindakan Berhati-hati menghadapi Resiko Dalam Usaha Bank, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Heru Suprpto, *Segi-segi Hukum yang Berkaitan dengan Penyelesaian Masalah Kredit Macet, Makalah disajikan dalam Diskusi Panel antara Mahkamah Agung dan BUPLN tanggal 28-29 Maret 1994*, Cisarua, Bogor.

Imma Indra Dewi, SH, M.Hum dan Iswantiningsih, SH, MS, (2009). *Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Penyelesaian Hambatan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta.

Taufiq El Rahman, (2016), *“Pembatalan Terhadap Lelang Eksekusi Dan Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Perbankan,” Seminar Nasional Dan Temu Kangen KANOGAMA, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DIY*.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Popok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK/.03/2005 tentang Ketentuan Kehatihatian Dalam Rangka Stimulasi Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah